

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran seperti tercantum pada Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 (Fattah, 2004: 2). Secara operasional, implementasinya tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab IV ayat 5 yang menyebutkan : "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan ialah mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutunya guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Visi yang terkandung dalam RPJP tersebut menyiratkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Mengacu pada aturan-aturan dasar tersebut, secara formal upaya-upaya menyiapkan kondisi, sarana/prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis akhlak yang menerpa semua lapisan masyarakat. Krisis akhlak tersebut bukan hanya terjadi pada orang tua, orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak usia sekolah (Zakaria, 2004: 14). Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, upaya pemberian pendidikan budi pekerti mulai dirintis baik yang terintegrasi dalam mata pelajaran maupun berdiri sendiri dalam bentuk pendidikan akhlak dan budi pekerti atau pengembangan kepribadian seperti yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pendidikan ke arah pemilikan budi pekerti luhur para siswa merupakan tanggungjawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh semua guru. Dengan demikian, kurang tepat kalau dikatakan bahwa mendidik

para siswa agar berbudi pekerti luhur hanya tanggungjawab guru mata pelajaran tertentu, misalnya guru PPKn atau guru pendidikan agama. Walaupun dapat dimengerti bahwa porsi yang dominan untuk mengajarkan budi pekerti adalah para guru yang relevan dengan budi pekerti.

Semua guru harus menjadi sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya. Sebab tidak akan berarti apa-apa bila seorang guru PPKn mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter. Atau seorang guru pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara yang nalar yaitu dengan menunjukkan dalil/ketentuan dari agama, perilaku para Nabi dan sahabat, sementara guru lain hanya mengatakan "pokoknya jawabannya harus seperti itu, kalau tidak begitu salah."

Setiap guru mengajar untuk membelajarkan para siswanya sesuai dengan tujuan utuh pendidikan. Tujuan utuh pendidikan jauh lebih luas dari misi pengajaran yang dikemas dalam tujuan instruksional khusus (TIK). Rumusan tujuan yang berdasarkan pandangan *behaviorisme* dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi (Joni, 1996: 42). Para pengembang kurikulum harus dapat membuka diri dalam mengembangkan pendekatan rumusan tujuan, sebab tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat tujuan-tujuan yang dapat diukur dan bersifat dapat dikuasai dalam satu atau dua pengalaman belajar, tetapi ada juga yang baru tercapai dalam waktu belajar yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemaksaan suatu pendekatan dalam pengembangan tujuan tidak dapat dipertahankan lagi (Hasan, 2000: 51).

Hasil belajar atau pengalaman belajar dari sebuah proses pembelajaran dapat berdampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung pengajaran dinamakan dampak instruksional (*instrucional effects*) sedangkan dampak tidak langsung dari keterlibatan para siswa dalam berbagai kegiatan belajar yang khas yang dirancang oleh guru yang disebut dampak pengiring (*nurturant effects*) (Joni, 1996: 45).

Program-program pendidikan budi pekerti sepatutnya menghasilkan warga negara yang aktif, yakni warga negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam lingkungan hidupnya (*environmental competence*) sebagai berikut: (1) kompetensi fisik (*physical competence*), yang dapat memberikan nilai tertentu terhadap suatu obyek. (2) kompetensi hubungan antarpribadi (*interpersonal competence*), yang dapat memberi pengaruh kepada orang-orang melalui hubungan antara sesama. (3) kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*), yang dapat memberi pengaruh kepada urusan-urusan masyarakat umum (Elias, 2001: 63).

Terkait dengan pengelolaan pembelajaran budi pekerti bahwa dalam penilaian hasil belajar, semua guru akan dan seharusnya mengukur kemampuan siswa dalam semua ranah (Waridjan, 1991: 7). Dengan penilaian seperti itu maka akan tergambar sosok utuh siswa sebenarnya. Artinya, dalam menentukan keberhasilan siswa harus dinilai dari berbagai ranah seperti pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (psikomotor). Seorang siswa yang menempuh ujian Matematika secara tertulis, sebenarnya siswa tersebut dinilai kemampuan penalarannya yaitu kemampuan mengerjakan soal-soal Matematika. Juga dinilai kemampuan budi pekertinya yaitu kemampuan melakukan kejujuran

dengan tidak menyontek dan bertanya kepada teman dan hal ini disikapi karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak baik. Di samping itu, ia dinilai kemampuan gerak-geriknya, yaitu kemampuan mengerjakan soal-soal ujian dengan tulisan yang teratur, rapi, dan mudah dibaca (Waridjan, 1991: 9).

Selain penilaian dilakukan terhadap semua kemampuan pada saat ujian berlangsung, boleh jadi seorang guru memperhitungkan tindak-tanduk siswanya di luar ujian. Seorang guru mungkin saja tidak akan meluluskan seorang siswa yang mengikuti ujian mata pelajaran tertentu karena perilaku siswa tersebut sehari-harinya adalah kurang sopan, selalu usil, dan suka berbuat keonaran meskipun dalam mengerjakan ujian siswa itu berhasil baik tanpa menyontek dan menuliskan jawaban ujian dengan tulisan yang jelas dan rapi. Oleh karena itu, akan tepat apabila pada setiap mata pelajaran dirumuskan tujuan pengajaran yang mencakupi kemampuan dalam semua ranah. Artinya, pada setiap rencana pembelajaran termuat kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor; dampak instruksional; dan dampak pengiring (Soenardjo dan Handono, 2000: 66). Dengan demikian, seorang guru akan menilai kemampuan dalam semua ranah ujian suatu mata pelajaran secara absah, tanpa ragu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian masal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, seperti Jakarta, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh

karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan budi pekerti (Zakaria, 2004: 43).

Pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Budi Pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Budi pekerti berkembang melalui empat tahap yaitu tahap anatomi, heteronomi, sosionomi, dan anatomi (Rachman, 2000: 78). Mengingat budi pekerti berkembang melalui tahapan-tahapan perkembangan anak dan pengaruh lingkungan dimana anak memiliki hak mengembangkan dirinya maka pendidikan budi pekerti hendaknya diberikan secara dini, sekarang, dan selalu setiap waktu. Oleh karena itu, guru di sekolah, orang tua di rumah, instruktur/pelatih di tempat kursus, tokoh masyarakat di masyarakat dalam mengembangkan budi pekerti anak harus bersifat spontan dan segera. Spontan dalam merespon, menegur, mengarahkan ketika anak berbuat tidak sesuai dengan nilai budi pekerti; segera memberi penguatan ketika anak berbuat sesuai dengan nilai budi pekerti.

Sekolah Dasar Negeri 01 Tugu sebagai sekolah yang berada pada level kota kecamatan dalam kenyataannya berhasil menjadi sekolah unggul. Hal itu didasarkan pada penilaian masyarakat sekaligus keberhasilan SD Negeri 01 Tugu dalam lima tahun terakhir dalam hal: tingkat kelulusan 100%, NEM kelulusan rata-rata 8,00, serta 95% lulusan SD Negeri 01 Tugu di terima di SMP negeri favorit di Kabupaten Karanganyar. Kondisi tersebut tidak lepas dari pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan yang tidak saja mencakup interaksi guru, siswa dengan sumber belajar tetapi juga orang tua siswa. Pengelolaan kegiatan belajar di SD Negeri 01 Tugu dilaksanakan dengan implmentasi manajemen pembelajaran yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan serta pengendalian.

Keunikan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri 01 Tugu adalah diadopsinya sistem pembelajaran dari negeri Cina. Pertama, SD Negeri 01 Tugu memberlakukan sistem ”semakin bisa semakin cepat pulang”. Pelaksanaan sistem tersebut yakni siswa yang dapat menyelesaikan tugas dari guru akan pulang lebih dahulu. Siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dari guru akan pulang belakangan sampai mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sistem ini selain mampu memacu motivasi berprestasi siswa juga mendorong orang tua untuk mendukung kesuksesan belajar anak. Orang tua menjadi tahu seberapa jauh kemampuan belajar anaknya. Apabila anak pulang terlebih dahulu berarti termasuk anak pandai, sedangkan apabila anak pulang belakangan berarti sedang mengalami kesulitan belajar atau memang termasuk anak yang kurang pandai.

Kedua, pelibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran dalam ruangan kelas. Apabila ada anak yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, guru akan memanggil orang tua ke sekolah. Selain bertujuan untuk memberitahu orang tua tentang kemajuan belajar anak, juga mencari penyebab terhambatnya kemajuan belajar anak khususnya yang berasal dari lingkungan keluarga seperti ketersediaan sarana dan prasarana, perhatian orang tua, pengawasan orang tua, dan sebagainya. Di samping itu, orang tua juga berperan sebagai tutor bagi anak dalam kelas. Orang tua dapat mendampingi anak-anaknya yang mengalami kesulitan dalam belajarnya dengan menjadi tutor yang membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa.

Keunikan ditinjau dari segi lokasi bahwa sebagai sekolah yang termasuk daerah pinggiran, capaian prestasi belajar siswanya dalam berbagai event baik akademik maupun non akademik cukup membanggakan. Dari segi prestasi akademik, capaian prestasi akademik siswa SD Negeri 01 Tugu dari tahun ke tahun masih yang terbaik khususnya di wilayah Kecamatan Jumantono. Capaian prestasi non akademik siswa SD Negeri 01 Tugu adalah menjadi juara baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam berbagai event olahraga maupun lomba rumpun mapel seperti lomba sains Fisika dan Matematika Atas konsistensi prestasi yang dicapai tersebut, SD Negeri 01 Tugu menjadi sekolah dasar unggul. Capaian prestasi baik akademik maupun non akademik siswa SD Negeri 01 Tugu masuk kategori sangat bagus mengingat input siswa yang hanya berasal dari wilayah Jumantono dan sekitarnya yang merupakan daerah terpencil.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan mengambil judul penelitian : **Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar (Studi Situs Sekolah Dasar Negeri 01 Tugu).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan fokus penelitian yaitu "Pengelolaan pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu". Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi 3 sub fokus sebagai berikut.

1. Perencanaan pembelajaran pada Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.
2. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.
3. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.
3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Pendidikan Dasar di SD Negeri 01 Tugu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini memiliki sumbangan teoretis dalam khasanah pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan khususnya acuan penelitian pengelolaan pembelajaran Pendidikan Dasar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat terhadap pihak-pihak terkait sebagai berikut:

a. Bagi Kepala Sekolah

Bahan informasi mengenai pentingnya pengelolaan pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga Kepala Sekolah dapat mengoptimalkan manajemen pengelolaan pembelajaran baik melalui penataan administrasi pembelajaran, sarana prasarana, lingkungan, guru, siswa maupun *stakeholder* terkait.

b. Bagi Komite Sekolah

Bahan informasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan peran serta komite sekolah terhadap manajemen sekolah.

c. Bagi Dinas Pendidikan

Bahan informasi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Kepala Sekolah maupun guru tentang pengelolaan pembelajaran melalui supervisi akademis melalui Pengawas Sekolah maupun pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan pembelajaran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah berikut ini.

1. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang melalui pengalaman. Hasil proses belajar dapat di pengaruhi dalam diri individu itu sendiri dalam tingkah laku baik faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa.
3. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan pola pikir siswa kearah yang lebih baik untuk mencapai hasil belajar yang optimal
4. Pengelolaan kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang manajemen pembelajaran yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan serta pengendalian.